

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) telah mendukung interoperabilitas data dalam pengelolaan arsip digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Interoperabilitas data pada SISMINKADA tercermin melalui aspek hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Dari aspek hukum, penerapan SISMINKADA didukung oleh regulasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan administrasi dan kearsipan digital. Dari aspek organisasi, koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan cukup baik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meskipun masih terdapat kendala pada jaringan dan integrasi sistem. Dari aspek semantik, penggunaan standar metadata dan klasifikasi arsip yang seragam membantu menjaga kesesuaian dan konsistensi data antar perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek teknis, sistem telah mendukung pengelolaan arsip secara digital, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain dan belum memiliki Application Programming Interface (API) sebagai penghubung antar sistem.

Penerapan interoperabilitas data pada SISMINKADA juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan birokrasi yang profesional dan adaptif melalui empat indikator utama, yaitu kompetensi aparatur, responsivitas terhadap perubahan, komitmen terhadap reformasi birokrasi, serta kualitas pelayanan administrasi. Hal ini sejalan dengan Teori Reformasi Birokrasi dari Sedarmayanti dan Teori Profesionalisme Aparatur dari Max Weber serta Sondang P. Siagian yang menjelaskan bahwa birokrasi modern harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, perubahan lingkungan organisasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Menurut Sedarmayanti (2007), reformasi birokrasi bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sumber daya manusia, sistem administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sementara itu, Max

Weber menjelaskan bahwa birokrasi modern harus dijalankan secara rasional berdasarkan kompetensi, aturan, pembagian tugas yang jelas, dan profesionalisme aparatur agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Selain itu, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa profesionalisme aparatur merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, tanggung jawab, serta etika kerja. Dari aspek kompetensi aparatur, penerapan sistem digital mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam menggunakan teknologi informasi, pengelolaan arsip digital, serta mendorong aparatur bekerja lebih sistematis, teliti, dan profesional. Aparatur dituntut mampu mengoperasikan sistem, memahami klasifikasi arsip digital, dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan sistem administrasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa interoperabilitas data pada SISMINKADA mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sebagaimana dijelaskan dalam teori profesionalisme aparatur. Dari aspek responsivitas terhadap perubahan, interoperabilitas data membantu birokrasi beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan administrasi yang semakin dinamis melalui integrasi data dan percepatan pertukaran informasi antar perangkat daerah. Pemanfaatan SISMINKADA menunjukkan adanya perubahan pola kerja birokrasi dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya kemampuan birokrasi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan organisasi. Dari aspek komitmen terhadap reformasi birokrasi, penerapan SISMINKADA menjadi bagian dari implementasi SPBE yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi administrasi pemerintahan. Integrasi data melalui interoperabilitas juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta meningkatkan efisiensi kerja birokrasi. Dengan demikian, interoperabilitas data menjadi salah satu bentuk nyata transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital. Sementara itu, dari aspek kualitas pelayanan administrasi, interoperabilitas data membantu meningkatkan efektivitas pelayanan melalui pengelolaan surat dan arsip secara elektronik yang lebih cepat, tepat, mudah diakses,

serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan interoperabilitas data pada SISMINKADA, seperti keterbatasan jaringan internet, belum terintegrasinya sistem dengan aplikasi lain, belum tersedianya API, potensi human error dalam pengelolaan arsip digital, serta risiko gangguan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar interoperabilitas data pada SISMINKADA dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung transformasi birokrasi digital di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet, agar akses terhadap SISMINKADA dapat berjalan lebih stabil dan optimal. Selain itu, diperlukan pemeliharaan sistem secara berkala serta penyediaan jaringan cadangan untuk mengantisipasi gangguan teknis.
2. Pengembangan Integrasi Sistem, SISMINKADA perlu dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang digunakan oleh perangkat daerah. Pengembangan API atau sistem penghubung antar aplikasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan interoperabilitas data yang optimal dan mengurangi proses pertukaran data secara manual.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur dalam penggunaan sistem kearsipan digital. Pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga

pada pemahaman standar kearsipan, klasifikasi arsip, dan ketelitian dalam pengelolaan data guna meminimalkan kesalahan (human error).

4. Penguatan Keamanan dan Keandalan Sistem, Perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan data, termasuk penguatan mekanisme backup, perlindungan terhadap serangan siber, serta monitoring sistem secara berkala untuk menjaga keandalan dan mencegah potensi gangguan atau kehilangan data.
5. Peningkatan Standarisasi dan Koordinasi Antar Instansi, Implementasi standar tata naskah dinas dan klasifikasi arsip perlu terus diawasi dan dievaluasi agar tetap konsisten di seluruh perangkat daerah. Selain itu, koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi dan evaluasi rutin untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan data.
6. Penguatan Peran Pimpinan dalam Implementasi Sistem, Dukungan pimpinan perlu terus ditingkatkan dalam mendorong pemanfaatan sistem secara optimal. Pimpinan diharapkan dapat memberikan arahan, kebijakan, serta motivasi kepada aparatur agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan sistem digital secara maksimal.
7. Pengembangan Berkelanjutan Sistem SISMINKADA, Perlu dilakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini penting agar SISMINKADA tetap relevan dan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan secara jangka panjang.